

Nomor : B/437/RB.06/2022
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Tahun 2021

7 Maret 2022

Yth. Bupati Karanganyar
di

Karanganyar

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Pemkab Karanganyar). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemkab Karanganyar tahun 2021 adalah **59,00** dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	16,81	16,85
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,82	5,49
	III. Reform	30,00	6,44	6,40
	Total Komponen Pengungkit	60,00	30,06	28,74

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2020	2021
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,69	7,69
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	6,38	8,22
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	6,45	7,59
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,36	6,76
	Total Komponen Hasil	40,00	28,88	30,26
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	58,94	59,00

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Karanganyar telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit khususnya di area pemenuhan dan komponen hasil secara keseluruhan.

2. Hasil antara area perubahan pada Pemkab Karanganyar, sebanyak 8 (delapan) hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Aparatur Sipil Negara yang Profesional	0-100	56,76 (Sangat Rendah)	Badan Kepegawaian Negara
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1-5	2,40 (Cukup)	Kementerian PANRB
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	30,87 (Kurang)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,15	Kementerian PANRB
5.	Kapabilitas APIP	0-5	2+	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Maturitas SPIP	0-5	3	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	74,10	Ombudsman RI
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	45,09 (Kurang)	Arsip Nasional Republik Indonesia

Dibanding dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara dan penambahan hasil antara yang baru dilakukan pengukuran tahun 2021. Untuk hasil antara yang tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2021, menggunakan data tahun sebelumnya.

3. Pemkab Karanganyar belum sepenuhnya melakukan tindak lanjut rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun sebelumnya, sehingga dinilai belum optimal dalam penerapan reformasi birokrasi baik pada tingkat Kabupaten maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
4. Pemkab Karanganyar telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Kualitas penerapan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten sudah berjalan cukup baik, namun penerapan reformasi birokrasi pada tingkat OPD belum merata terhadap seluruh OPD, sehingga belum mampu memberikan dampak perubahan yang signifikan;

- b. Beberapa catatan dalam hal Manajemen Perubahan sebagai berikut:
- Pembentukan agen perubahan belum dilengkapi dengan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya, sehingga belum diketahui sejauh mana perubahan yang telah dihasilkan oleh para agen perubahan;
 - Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) perlu dikomunikasikan secara *massive* guna percepatan perbaikan program reformasi birokrasi di Pemkab Karanganyar.
- c. Pada penataan peraturan perundang-undangan, Pemkab Karanganyar telah melakukan upaya sebagai berikut:
- Telah dilakukannya harmonisasi/sinkronisasi peraturan perundang-undangan meskipun belum sepenuhnya menyasar kepada percepatan dan efisiensi pelayanan. Disamping itu, belum adanya tindak lanjut atas rekomendasi tahun lalu terkait penyusunan pemetaan keterkaitan antar kebijakan pada seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di lingkungan Pemkab Karanganyar;
 - Adanya aplikasi sistem penataan perundang-undangan APENDUKUM (Aplikasi Penyusunan Produk Hukum) yang telah dimanfaatkan di lingkungan Pemkab Karanganyar. Selain itu, telah dilakukan evaluasi terhadap aplikasi sehingga teridentifikasi berbagai kendala yang kerap muncul ketika mengakses aplikasi. Hal ini dilanjutkan dengan penyusunan laporan hasil evaluasi yang memuat identifikasi masalah serta rencana tindak lanjut hasil evaluasi.
- d. Peta proses bisnis yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan hasil penyederhanaan birokrasi dan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, sehingga belum terlihat efektivitas struktur organisasi yang selaras dengan kinerja organisasi yang dihasilkan. Disamping itu, peta proses bisnis pada OPD belum menggambarkan keterkaitan antar OPD secara jelas sehingga struktur organisasi yang ideal belum terlihat;
- e. Dalam hal peningkatan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
- Belum optimalnya penerapan SPBE tergambar dari belum disusunnya arsitektur pengembangan SPBE di lingkungan Pemkab Karanganyar. Disamping itu, monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan untuk mengukur efektifitas dan manfaat dari aplikasi-aplikasi yang telah ada;
 - Implementasi SPBE yang masih parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh masih belum mampu mendorong peningkatan pelayanan baik internal maupun eksternal agar semakin cepat dan efisien.
- f. Beberapa catatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur sebagai berikut:
- Indikator kinerja individu yang disusun belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi di atasnya, sehingga belum optimal dimanfaatkan sebagai indikator capaian kinerja pegawai dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - Belum dilaksanakannya penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karier individu/pemberian *reward and punishment* terhadap pegawai secara optimal.
- g. Dalam peningkatan manajemen kinerja, Pemkab Karanganyar telah mengembangkan aplikasi monitoring kinerja namun belum secara optimal mendorong perbaikan kinerja;

- h. Implementasi penguatan kebijakan pengawasan yang masih lemah sehingga upaya yang dilakukan pada area penguatan pengawasan masih sebatas pemenuhan dokumen, belum mengarah kepada penerapan atas kebijakan yang telah ada baik pada level kabupaten maupun level OPD. Pada upaya peningkatan integritas, Pemkab Karanganyar telah membangun 3 Unit Kerja menuju ZI WBK, namun belum berhasil mendapat predikat WBK pada tahun 2021;
- i. Beberapa catatan dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:
- Implementasi pelayanan publik khususnya di OPD pelayanan dalam hal sistem kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar belum diterapkan secara optimal;
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan setiap semester dan baru dilakukan pada sebagian OPD. Disamping itu, hasil penilaian SKM telah dipublikasikan dan dapat diakses pada website sipp.menpan.go.id. Namun, hasil penilaian SKM tersebut belum ditindaklanjuti serta dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab Karanganyar.
5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemkab Karanganyar memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan, 2021
2	Nilai SAKIP	0-100	67,00	Kementerian PANRB, 2020
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	82,17	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	75,90	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	76,93	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di lingkungan Pemkab Karanganyar, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam internalisasi pembangunan Reformasi Birokrasi melalui monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi agar tampak perubahan yang dilakukan;
2. Melakukan komunikasi secara intens terkait RATL kepada seluruh tim reformasi birokrasi baik di tingkat pusat maupun OPD guna mempercepat perbaikan implementasi reformasi birokrasi di Pemkab Karanganyar;

3. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap pembangunan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau disosialisasikan terhadap seluruh pegawai;
4. Menyusun peta keterkaitan antar kebijakan dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Karanganyar dikaitkan dengan kebijakan internal maupun eksternal dengan tindak lanjut berupa revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron. Selain itu, pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan atas sistem penataan perundang-undangan agar terus diterapkan di lingkungan Pemkab Karanganyar;
5. Memastikan peta proses bisnis yang telah disusun disesuaikan dengan hasil penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan memperhatikan kinerja yang akan dihasilkan;
6. Meningkatkan implementasi SPBE melalui penyusunan arsitektur pembangunan SPBE yang dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan pengintegrasian sistem yang memiliki fungsi yang terkait atau sejenis, dan mendorong pemanfaatan sistem informasi lebih maksimal baik di lingkup internal pegawai maupun untuk pelayanan publik kepada masyarakat sehingga seluruh pegawai dan masyarakat dapat memperoleh kemudahan pelayanan;
7. Mengoptimalkan perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui dialog kinerja, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian oleh seluruh pegawai;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi seluruh aplikasi yang telah dibangun sehingga dapat dipastikan bahwa aplikasi tersebut telah dimanfaatkan dengan baik oleh pegawai dan dilakukan integrasi aplikasi yang memiliki fungsi yang sama;
9. Membangun zona integritas unit kerja sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui berbagai inovasi terkait penerapan manajemen internal, sistem pengawasan, dan sistem integritas di tingkat OPD;
10. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP serta meningkatkan implementasi atas kebijakan pengawasan baik di level Kabupaten maupun OPD;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penetapan standar pelayanan publik, pemberian kompensasi kepada penerima layanan dan melakukan survei kepuasan masyarakat secara intens sehingga dapat menjadi bahan perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder* di tahun berikutnya.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jawa Tengah.